6 Kali Berturut-Turut, Pemkab Pasuruan Pertahankan Predikat Opini WTP

Jumat, 17 Mei 2019

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya berturut-turut. Predikat ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dianggap baik, yang diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Pasuruan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, dan Sekda Kabupaten Pasuruan.

Penyerahan piagam WTP ini menandai komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Bupati Pasuruan menekankan bahwa WTP ini adalah hasil kerja keras seluruh OPD yang terus belajar dari kekurangan dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun demikian, Bupati Irsyad Yusuf mengingatkan bahwa ini bukanlah akhir dari upaya perbaikan, dan tetap diperlukan upaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan profesionalitas.

BPK memberikan catatan terkait penanganan aset dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang masih perlu ditertibkan. Pemkab Pasuruan berkomitmen untuk segera memperbaiki catatan tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan berharap agar seluruh rekomendasi Dewan segera ditindaklanjuti untuk mencegah catatan serupa di tahun-tahun mendatang.

Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah atas kerja samanya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.